

BENTENG DALAM KRATON YOGYAKARTA

Revitalisasi Ditargetkan Selesai 2 Tahun

YOGYA (KR) - Revitalisasi Benteng (Margi Hinggil) Kraton Yogyakarta bagian dalam ditargetkan bisa selesai dalam dua tahun ke depan. Anggaran untuk revitalisasi yang menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) DIY tersebut jumlahnya belum dapat dipastikan, karena proses pembebasan lahan masih berjalan. Rencananya selama 2 tahun ke depan proses revitalisasi diutamakan di bagian dalam benteng terlebih dahulu yang diselesaikan.

"Total anggarannya masih dalam perhitungan, sehingga kami belum bisa menjelaskan rinci. Sebab proses pembebasan lahan juga masih berlangsung," kata Paniradya Pati Paniradya Kaistimewaan DIY Aris Eko Nugroho di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (13/9).

Menurut Aris, untuk menyelesaikan pembangunan dalam benteng masih panjang. Karena ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, seperti desain plengkung dan struktur-struktur lainnya. Meski begitu semua proses berjalan terutama yang berkaitan dengan masyarakat. Termasuk berkoordinasi dengan masyarakat terdampak terus

dilakukan. Jadi ada kesepakatan dengan warga misalnya terkait waktu pembayaran.

"Perhitungan ganti untung atau yang disebut 'bebungah' ditentukan sesuai perhitungan dari appraisal atau taksiran nilai properti umumnya. Jadi perhitungannya (nominalnya) bisa berbeda-beda tergantung luasan lahan dan bangunan yang ditempati warga," ungkapnya.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY Dian Lakshmi Pratiwi mengungkapkan, penataan Kawasan Sumbu Filosofi terus dilakukan, salah satunya dengan merevitalisasi benteng, termasuk Pojok Beteng Wetan di Jalan Mangunegaran Wetan. Pengembalian fungsi benteng itu dilakukan untuk membuka asal-usul benteng. Karenanya rumah warga yang selama ini mengindung atau menempel di sisi dalam benteng akhirnya dibongkar.

Luasan rumah yang menempel ke benteng sebetulnya tidak terlalu besar. Rata-rata rumah kebanyakan dimiliki abdi dalem, dengan luas 2x3 meter atau 4x6 meter saja.

"Sistemnya kita pemetaan dulu, ngobrol dulu dengan masyarakat di situ. Karena kita

sudah punya base practice (pengalaman) saat revitalisasi Wijilan. Bebungah kita berikan dari pendataan, kita berikan penilaian bangunan, penilaian profesi mereka, kehidupan mereka seperti appraisal (penaksiran). Istilahnya bukan ganti untung, ganti rugi, tetapi bebungah," jelas Dian.

Karena penghitungan dilakukan sesuai appraisal, menurut Dian, jumlah uang bebungah yang diberikan kepada warga terdampak berbeda satu dengan lainnya. Namun rata-rata mereka akhirnya bisa membeli rumah baru dengan sertipikat SHM dari hasil uang bebungah tersebut.

"Revitalisasi Benteng Kraton tidak sekadar upaya Pemda DIY mengejar predikat Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO. Namun lebih pada menjamin kepastian nilai-nilai sejarah benteng bisa tetap terjaga hingga anak cucu. Apalagi saat ini Benteng Kraton terancam rusak akibat intervensi bangunan-bangunan yang menempel. Bahkan ada sisi benteng yang seharusnya tertutup sesuai sejarah pun akhirnya dibuka untuk memudahkan keluar-masuk orang," paparnya. (Ria)-f

Kereta

Dengan kecepatan itu, Presiden menceritakan, perjalanan di dalam kereta sangat nyaman. Ia pun mengaku sebetulnya laju kecepatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa mencapai 385 km/jam. "Ini sebetulnya bisa 385 tapi memang untuk kenyamanan dipasang di 350 km/kam," kata Presiden.

Kepala Negara juga memastikan keamanan perjalanan KCJB mengingat transportasi tersebut sudah dikembangkan di China dengan panjang jalur operasional mencapai 48.000 km. Saat ini, tahap uji coba operasional masih dilakukan secara bertahap kepada BUMN, sedangkan untuk masyarakat ditargetkan mulai Oktober mendatang. Sejauh ini, kondisi fasilitas di kawasan Stasiun Halim KCJB sudah mencapai 92 persen atau sudah tahap penyelesaian.

Sementara itu rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, menurut Presiden, masih dalam studi dan dikalkulasi secara lebih rinci, termasuk penentuan rutenya. "Kalau yang ke Surabaya masih dalam studi, masih dalam kalkulasi, juga penentuan trasenya di sebelah mana baru dalam studi semuanya," kata Presiden.

Presiden mengaku belum bisa menjawab secara rinci karena perencanaan termasuk studi dan perhitungan terkait pembangunan belum selesai dilakukan. Namun demikian, dijelaskan, trayek KC Jakarta-Surabaya akan melintasi rute KC Jakarta-Bandung untuk menumbuhkan titik ekonomi baru di sepanjang lintasan.

"Ini untuk Jawa bagian Selatan. Kalau Jawa Utara kan sudah jalan tol. Buat

menumbuhkan titik-titik ekonomi baru," kata Presiden.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek perpanjangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sampai Surabaya, Jawa Timur, tetap dilanjutkan. Berdasarkan pembahasan di Kemenhub, proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah proyek kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, rampung sepenuhnya. "Mau dibahas, sekarang sampai Tegalluar, Kabupaten Bandung," kata Menhub seraya menyebutkan, kemungkinan proyek kereta cepat sampai Surabaya baru terealisasi pada periode pemerintahan berikutnya. "Nanti akan sampai Surabaya untuk kabinet selanjutnya," katanya. (Ant/San)-f

Tokoh

Menurutnya, beberapa elite partai politik pendukung Ganjar, seperti Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dari Perindo juga akan menjadi pimpinan TPN. Tokoh masyarakat, pakar di berbagai bidang, hingga kalangan profesional juga bakal dilibatkan dalam TPN demi menjaga kesinambungan program era Jokowi dengan Ganjar saat kontestasi Pilpres 2024.

"Ada juga dari tokoh-tokoh masyarakat, dari perwakilan sesuai dengan demografi dan juga geografis dan juga unsur-unsur profesional dari para pakar mengingat kepemimpinan Pak Ganjar itu kesinambungan dengan gerakan kemajuan yang sudah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo," kata Hastu.

Pimpinan TPN bersama elite partai politik pendukung bakal capres Ganjar Pranowo tersebut mengadakan pertemuan

di Gedung High End Menteng Jakarta Pusat. Pertemuan dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoë, dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Hastu mengatakan pertemuan juga dihadiri sekretaris jenderal parpol pendukung pendukung Ganjar sebagai bakal capres 2024. "Rapat kali ini dibahas berbagai agenda-agenda strategis, yang pertama terkait dengan dinamika politik nasional yang disampaikan para ketua umum partai," ujarnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada TPN Ganjar Pranowo agar turun langsung ke lapangan untuk menangis dan tersenyum

langsung bersama rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. "Kami akan bekerja langsung sebagaimana diarahkan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa supaya segera melakukan aksi, reaksi, dan langsung turun ke lapangan serta senantiasa menangis dan tersenyum bersama dengan rakyat," ujarnya.

Mardiono juga menuturkan bahwa TPN Ganjar tidak berhenti sampai pilpres saja, tetapi untuk memenangi pemilu, baik itu di level maupun pilkada. Pasalnya, esensi dari kemenangan ini adalah kebersamaan. "Dalam pembahasan, tidak hanya selesai membahas kemenangan di dalam, tetapi juga membahas tim pemenangan pemilu dari partai yang bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan," katanya. (Ant/Has)-d

Gaji

tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sedangkan tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan pencapaian performa. Untuk tunjangan kemahalan didasarkan oleh tingkat kemahalan indeks harga yang berlaku di masing-masing daerah penempatan ASN.

Rencana penerapan sistem gaji tunggal bagi ASN ini sebenarnya bukan ide baru. Rencana penerapan sistem ini sudah muncul sejak 2017 silam. Selama ini, bukan rahasia lagi bahwa pemberian gaji ASN yang tidak merata pada berbagai kementerian dan departemen telah memicu munculnya kecemburuan sosial.

Dari segi beban kerja, tanggung jawab dan performa sebetulnya antara ASN satu dengan yang lain tidak banyak berbeda. Dalam level kepangkatan yang sama, beban kerja para ASN umumnya tidak banyak berbeda. Ketika ada ASN di kementerian tertentu mendapatkan gaji yang jauh lebih besar daripada ASN di kementerian yang lain, maka jangan heran jika sebagian ASN merasa diperlakukan tidak adil.

Dalam pelaksanaan sistem gaji tunggal, pemberian gaji ASN menurut rencana akan ditentukan berdasarkan sistem *grading*. *Grading* adalah level atau tingkat nilai maupun harga jabatan yang menunjukkan perbedaan tanggung jawab, posisi, beban kerja, dan risiko pekerjaan. Prinsip yang menjadi dasar penentuan gaji tunggal adalah keadilan internal dan keadilan eksternal.

Keadilan internal berkaitan dengan tugas jabatan, kinerja, dan wilayah kerjanya. Sedangkan untuk keadilan eksternal berkaitan dengan besaran gaji pekerja di luar instansi pemerintahan, baik perusahaan swasta, gaji PNS negara lain, maupun karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jangan sampai terjadi, ASN yang jujur dan berkarier dengan baik, ternyata gajinya kalah jauh dengan karyawan BUMN yang notabene juga milik pemerintah.

Dibandingkan sistem penggajian ASN selama ini, sistem gaji tunggal di atas kertas memiliki keunggulan karena akan dapat meningkatkan efisiensi dalam kinerja aparat birokrasi. Bila sebelumnya tunjangan yang diberikan kepada ASN tidak berorientasi pada output, maka ke depan penentuan gaji ASN akan lebih banyak berkaitan dengan output atau kinerja ASN yang bersangkutan.

Praktik korupsi ASN yang seringkali menerima penghasilan meski tidak melakukan kerja yang sesuai tugasnya, ke depan diharapkan akan dapat dieliminasi. Dengan penerapan sistem gaji tunggal, perhitungan gaji ASN niscaya menjadi lebih simpel dan lebih efektif. Dengan memberikan gaji berdasarkan output, maka bagi ASN yang bekerja lebih keras dan giat tentu akan puas karena merasa lebih dihargai dibandingkan dengan ASN yang kerjanya kurang baik. Saat ini kita hanya bisa menunggu waktu kapan sistem gaji tunggal ASN benar jadi dilaksanakan. Dan pemberian gaji ASN yang berkeadilan benar-benar diimplementasikan. (Penulis adalah Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga)-d

Sambungan hal 1

SEMPAT MENANGIS TERSEDU-SEDU

Hasnaeni 'Wanita Emas' Divonis 5 Tahun



KR-Antara/Fath Putra Mulya

Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical Hasnaeni Moein atau 'Wanita Emas' divonis 5 tahun penjara oleh hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/9/2023).

JAKARTA (KR) - Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical Hasnaeni Moein atau 'Wanita Emas' divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi pidana kurungan 2 bulan dalam kasus korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk pada 2016-2020. Selain itu, Hasnaeni juga divonis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 17.583.389.175,00. Apabila yang bersangkutan tidak membayar uang pengganti tersebut 1 bulan pascaputusan inkrah, harta bendanya disita dan dilelang.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," kata Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/9).

lenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," kata Fahzal.

Di samping itu, majelis hakim mengatakan, Hasnaeni tidak merasa bersalah dan menunjukkan sikap penyelesaian atas perbuatannya serta terdakwa hanya menyesali telah melakukan kerja sama dengan PT Waskita Beton Precast.

Hasnaeni menangis teredu-sedu mendengarkan Hakim Ketua membacakan vonis terhadap dirinya. Ditemui usai sidang, Hasnaeni mengaku tidak merasa bersalah. Saya dipergunakan tanda tangan-

nya dengan orang saya dan orang-orang (PT) Waskita Beton Precast. Jadi, saya merasa berat sekali hidup satu hari saja dalam tahanan, luar biasa menderitanya saya lalu," kata Hasnaeni.

Hal-hal yang meringankan Hasnaeni, menurut hakim, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. Ia memiliki tanggung jawab tiga anak dan belum pernah dihukum sebelumnya.

"Menyatakan terdakwa Hasnaeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum," ucap Hakim Ketua. (Ant/Obi)-f

Majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut dengan menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. "Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penye-

Sajikan

"Nasi Tumpeng Jangka merupakan tumpeng berukuran besar, yang mengandung makna suatu *gagayuhan* atau *panjangka*. Semoga harapan masyarakat Mantran Wetan dapat tercapai," katanya.

Dikatakan, setiap Kepala Keluarga (KK) mengeluarkan satu ingkung ayam saat Kenduri Saparan atau Merti Dusun yang dilaksanakan di depan rumah Kepala Dusun Mantran Wetan. Ayam untuk ingkung merupakan ayam pilihan, dengan jenis ayam kampung. Kalau jumlah warga di Mantran Wetan ada 160 KK, maka ingkung ayam saat kenduri jumlahnya juga 160 ingkung. Khusus ayam untuk kenduri, proses penyembelihannya dilakukan kaum atau modin setempat.

Selain itu, untuk menjamu tamu yang datang ke rumah, juga disediakan ingkung ayam lain. Setiap KK kadang bisa menyediakan 5-7 ingkung ayam. Itu sebabnya juga dikenal dengan sebutan 1.000 ingkung ayam, atau bahkan lebih banyak jumlahnya, mengingat jumlah ingkung ayamnya yang

disediakan untuk menjamu tamu juga banyak. Saparan atau Bersih/Merti Dusun di Mantran Wetan dilaksanakan setiap Rabu Pahing di bulan Sapar. Kalau di bulan Sapar tidak ada hari Rabu Pahing, akan dilaksanakan pada Rabu Pahing bulan berikutnya atau bulan Mulud. Rabu siang juga dipentaskan wayang kulit hingga tengah malam, sedangkan pentas kesenian dilaksanakan Jumat.

Kepala Dusun Mantran Wetan Handoko mengatakan, Saparan setelah pandemi Covid-19 tahun ini dilakukan semeriah mungkin. Rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat rezeki yang dilimpahkan selama ini dilakukan. Ada sekitar 160 ingkung ayam yang disajikan dalam Kenduri Saparan ini. Untuk menjamu tamu yang bersilaturahmi di setiap rumah, jumlah ingkung ayamnya lebih banyak, sehingga jumlah ingkung ayam saat Saparan bisa lebih dari 1.000. "Satu KK bisa sampai 4-5 ingkung, bahkan ada yang sampai 10 ingkung," katanya. (Tha)-f

Sambungan hal 1

Enembe

jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," ucap Wawan.

Dijelaskan jaksa, hal-hal yang memberatkan Lukas adalah perbuatannya tidak mendukung program pemberantasan korupsi, ia berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Lukas bersikap tidak sopan selama persidangan. "Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," sambungunya.

Menurut jaksa, Lukas Enembe melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini, JPU mendakwa Lukas Enembe dengan dua dakwaan.

Pertama, Lukas didakwa menerima suap Rp 45.843.485.350 dengan rin-

cian sebanyak Rp 10.413.929.500 dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur, dan sebanyak Rp 35.429.555.850

berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu. Kedua, Lukas Enembe didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp 1 miliar dari Budy Sultan. (Ful)-f



Prakiraan Cuaca						Kamis, 14 September 2023	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban	
Bantul					22-30	65-95	
Sleman					22-29	65-95	
Wates					22-29	65-95	
Wonosari					22-30	65-95	
Yogyakarta					22-30	65-95	

Kecerdasan Buatan dalam Politik: Menuju Transformasi Peran Wakil Rakyat di Indonesia Tahun 2024



Arif Akbarul Huda, S.Si, M.Eng. Dosen Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta

suara, yang seolah-olah dibuat oleh manusia. Teknologi ini dapat menghasilkan pidato, dokumen kebijakan, dan bahkan argumen berdasarkan data dan pola yang telah ada. Inilah beberapa potensi penerapannya dalam politik:

- Penciptaan Materi Kebijakan**
Generative AI dapat menciptakan teks kebijakan dengan cepat berdasarkan data dan input yang telah ada. Ini mempercepat proses perumusan kebijakan dan memungkinkan pembuatan dokumen-dokumen yang lebih lengkap dan informatif.
- Analisis Data yang Mendalam**
Generative AI mampu menganalisis data politik dalam skala besar dan mengidentifikasi tren serta pola yang mungkin sulit untuk dideteksi oleh manusia. Ini dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan yang lebih berdasarkan bukti.
- Diskusi dan Debat Otomatis**
Generative AI juga dapat digunakan untuk menghasilkan argumen dan kontra-argumen dalam diskusi politik. Hal ini dapat menciptakan platform di mana kebijakan dapat diuji

dan dibahas secara otomatis.

- Tantangan dalam Penggantian Peran Wakil Rakyat oleh Generative AI**
Meskipun generative AI memiliki potensi besar, ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi:
 - Pertimbangan Etis**
Pengambilan keputusan politik seringkali melibatkan pertimbangan etis dan nilai-nilai yang kompleks. Generative AI mungkin tidak dapat memahami nuansa ini sepenuhnya dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.
 - Pengawasan dan Akuntabilitas**
Dalam sistem demokratis, wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada pemilih mereka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Dalam kasus generative AI, pertanyaannya adalah bagaimana mengawasi dan mengontrol algoritma yang menghasilkan kebijakan. Diperlukan kerangka kerja pengawasan yang ketat.
 - Ketergantungan pada Teknologi**
Ketergantungan pada generative AI meningkatkan risiko terhadap gangguan teknis atau serangan siber yang dapat

ganggu proses politik. Keamanan dan ketahanan generative AI menjadi faktor penting.

- Pendekatan yang Bijaksana**
Penggantian peran wakil rakyat oleh generative AI memerlukan pendekatan yang bijaksana. Sebaliknya AI digunakan untuk menginformasikan kebijakan, sementara keputusan akhir tetap di tangan manusia yang memahami konteks sosial, budaya, dan etika yang terlibat. Pengawasan yang ketat dan regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa generative AI digunakan secara etis dan transparan.
- Pengembangan Generasi AI yang Cerdas dan Etis**
Penelitian dan Pengembangan - Investasi dalam penelitian dan pengembangan AI yang canggih untuk memastikan bahwa teknologi generative AI dapat memenuhi standar yang tinggi. Etika AI - Menerapkan kerangka kerja

etika AI yang ketat untuk memastikan bahwa generative AI tidak menghasilkan kebijakan yang melanggar nilai-nilai masyarakat atau prinsip-prinsip etika.

- Kerangka Hukum dan Regulasi**
Undang-Undang Khusus - Mengembangkan undang-undang khusus yang mengatur penggunaan generative AI dalam politik dan mengidentifikasi batasan-batasan penggunaannya. Pengawasan - Membuat badan pengawas atau mekanisme pengawasan yang dapat memantau dan mengaudit penggunaan generative AI dalam politik.
- Pelatihan dan Pendidikan**
Pelatihan SDM - Melatih dan mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat memahami, mengawasi, dan mengelola generative AI dengan baik. Kampanye Pendidikan - Melakukan kampanye pendidikan kepada masyarakat untuk memahami penggunaan generative AI dalam politik dan dampaknya.
- Konsultasi Publik dan Partisipasi**
Diskusi Publik - Mengadakan diskusi publik dan mendengarkan masukan dari masyarakat tentang penggunaan generative AI dalam politik.

Transparansi - Memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan generative AI.

- Keamanan Teknologi**
Keamanan Data - Mengamankan data yang digunakan oleh generative AI dan mencegah potensi ancaman siber. Penanganan Krisis - Mempersiapkan rencana penanganan untuk menghadapi masalah teknis atau gangguan dalam penggunaan generative AI.
- Pengujian dan Evaluasi Berkelanjutan**
Pengujian Kinerja - Melakukan pengujian kinerja generative AI secara berkala untuk memastikan keahliannya dalam menghasilkan kebijakan yang baik. Evaluasi Dampak - Mengevaluasi dampak penggunaan generative AI terhadap proses politik dan masyarakat serta melakukan perbaikan yang diperlukan.
- Kerja Sama Internasional**
Kolaborasi dengan negara-negara lain dalam pengembangan regulasi dan etika AI. Standardisasi - Berkontribusi dalam pembentukan standar internasional terkait penggunaan generative AI dalam politik.



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA Creative Economy Park

Penggantian peran wakil rakyat oleh generative AI dalam politik adalah langkah yang serius dan perlu dipersiapkan dengan matang. Mengintegrasikan teknologi ini dalam politik memerlukan perhatian khusus terhadap etika, hukum, pelatihan, dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang bijaksana, Indonesia dapat mencapai potensi penuh penggunaan generative AI dalam politik dengan menjaga nilai-nilai demokrasi dan kepentingan masyarakat. Indonesia tahun 2024 menghadapi peluang untuk memanfaatkan generative AI dalam proses politik. Ini bisa menjadi alat yang kuat untuk mempercepat perumusan kebijakan dan analisis data yang mendalam. Namun, perlu ada keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai demokrasi. Pengawasan dan etika harus tetap menjadi fokus utama agar penggunaan generative AI dalam politik dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar. ***